

PEMILIHAN PRESIDEN AMERIKA SERIKAT 2020 DAN IMPLIKASINYA BAGI DUNIA

Poltak Partogi Nainggolan dan Simela Victor Muhamad

Abstrak

Joe Biden, calon presiden asal Partai Demokrat, akhirnya memenangkan pemilihan presiden (pilpres) Amerika Serikat (AS) tahun 2020 setelah unggul dalam penghitungan suara atas calon petahana dari Partai Republik, Donald Trump. Pilpres AS menarik untuk diikuti perkembangannya, tidak saja oleh masyarakat AS, tetapi juga masyarakat internasional. Melalui tulisan ini, dibahas pelajaran berharga dari pilpres AS 2020, konsekuensinya jika bermasalah, serta implikasi dari terpilihnya Biden, dan bagaimana dunia meresponsnya. Dari pelaksanaan pilpres AS terlihat bahwa kualitas demokrasi bisa mengalami kemerosotan jika para aktor politiknya tidak konsisten dan patuh pada aturan. Permasalahan dalam pilpres dapat diatasi jika aparat penegak hukum dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan mampu membuktikan keamanan demokrasi. Kehadiran Biden yang disambut hangat dunia diharapkan akan mengembalikan multilateralisme dan peran konstruktif AS dalam merespons berbagai isu di tingkat global dan kawasan, antara lain penanganan pandemi Covid-19, penguatan kerja sama ekonomi, perubahan iklim, dan penanganan konflik di berbagai kawasan, termasuk isu Palestina.

Pendahuluan

Pemilihan Presiden (Pilpres) Amerika Serikat (AS) tahun 2020 yang dilaksanakan pada 3 November 2020 telah menghasilkan pemenang, yaitu Joe Biden dari Partai Demokrat, mengalahkan Donald Trump, calon petahana dari Partai Republik (Kompas, 8 November 2020). Kemenangan diraih Biden setelah memperoleh lebih dari

270 suara elektoral (*electoral votes*) sebagai syarat minimal untuk memenangkan pilpres AS (cnn.com., 8 November 2020). Dalam pilpres AS, kandidat dinyatakan menang jika sudah meraih 270 suara elektoral, adapun total suara elektoral ialah 538.

Pilpres AS yang diselenggarakan setiap empat tahun sekali menarik untuk diikuti perkembangannya, tidak



saja bagi masyarakat AS tetapi juga masyarakat internasional, karena dari sini akan hadir Presiden AS berikutnya yang kebijakannya bisa memengaruhi dunia. Tulisan ini membahas secara singkat pelajaran berharga apa yang diperoleh dari pelaksanaan pilpres AS 2020, apa konsekuensinya jika bermasalah, serta apa implikasi dari terpilihnya Joe Biden sebagai Presiden AS ke-46 terhadap kawasan dan global, dan bagaimana respons dunia?

Pelajaran Berharga dari Pilpres AS 2020

Penyelenggaraan pilpres AS tahun ini memberi pelajaran berharga bagi Indonesia. *Pertama*, pengalaman berdemokrasi di AS selama hampir 250 tahun, dibandingkan dengan Indonesia yang baru 75 tahun, menunjukkan bahwa kualitas demokrasi bisa mengalami kemerosotan jika para aktor politiknya tidak konsisten dan patuh pada aturan. Jika Trump taat pada aturan dan disiplin, seharusnya sikap dan responsnya untuk menghentikan penyelenggaraan pemilu secara tiba-tiba tanpa alasan yang kuat tidak dilakukan. Egoisme politik dan sikapnya yang tidak dewasa, dengan melakukan protes dan intervensi yang tidak disertai alat bukti hukum sehingga memperlihatkan perilaku tidak siap kalah, tidak layak diperlihatkan oleh elit politik nasional sekaligus presiden petahana.

Kedua, Trump sebagai presiden petahana tidak memberi contoh yang baik kepada

pendukungnya untuk bersikap rasional dan *fair play* dalam berpolitik. Trump terlalu berani untuk terus melibatkan dan memainkan emosi pendukungnya demi mengamankan tujuan politik dan kepentingan pribadinya yang lebih luas. Hal ini berbahaya karena akan membawa pendukungnya berhadapan dalam konflik horizontal dengan pendukung Demokrat dan publik AS. Hampir tidak pernah terjadi dalam penyelenggaraan pemilu di AS, militer (*National Guard*) diturunkan untuk menjaga keamanan, seperti di negara bagian Philadelphia dan Portland yang rawan bentrokan. Padahal, selama ini dunia internasional memahami, di AS yang berlaku adalah prinsip supremasi sipil dengan militer tetap di barak, kecuali ada panggilan khusus untuk menghadapi situasi darurat seperti dalam penyelenggaraan pilpres tahun 2020 ini.

Jika Penghitungan Suara Bermasalah

Sikap Trump sebagai Presiden petahana yang meminta penghentian penghitungan suara dan akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung (*Supreme Court*) tanpa dilengkapi alat bukti hukum atas tuduhan kecurangan dalam penghitungan suara yang diberikan melalui pos menimbulkan kekhawatiran akan munculnya ketidakpastian terhadap hasil pemilu. Namun, kekhawatiran itu tampaknya dapat segera berlalu selama sistem politik AS bekerja dengan baik tanpa intervensi penguasa. Ini

terlihat dari proses penghitungan suara yang tetap berlangsung, sehingga perkembangan dan prospek akhirnya dapat terus dipantau publik, tidak hanya pengamat.

Terlepas dari itu, jika perkembangan negatif terjadi, *deadlock* penghitungan suara terjadi, dan kerusuhan di jalanan terjadi di antara kedua kubu pendukung, ketidakpastian politik akan muncul. Namun, sepanjang aparat keamanan dan penegak hukum dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan mampu membuktikan keamanan demokrasi AS, ketidakpastian tidak akan berlangsung lama. Peran Mahkamah Agung yang netral bisa menjadi penyelamat demokrasi dan kredibilitas penegakan hukum di AS. Jika lembaga peradilan tidak netral, kekerasan dapat meluas dan ketidakpastian politik menggagalkan pilpres.

Kemenangan Biden dan Implikasinya

Sebagaimana janji kampanyenya, *President Elect*, Joe Biden, setelah pelantikan pada awal Januari 2021, akan membawa kembali AS pada keputusan Konferensi Perubahan Iklim PBB yang telah disepakati di Paris pada 2015. Sebelum ini, pada era pemerintahan Trump, AS meninggalkannya dengan menarik diri tiba-tiba dan melalaikan tanggung jawabnya sebagai salah satu negara penghasil emisi karbon (CO₂) terbesar di dunia. Tekad kuat Biden pada isu lingkungan akan

berpengaruh signifikan dalam mengurangi dampak perubahan iklim global, antara lain kebakaran hutan yang marak terjadi belakangan, termasuk di AS.

Dengan bergantinya kepemimpinan di AS dari Donald Trump ke Joe Biden, peran dan tanggung jawab AS untuk menjaga keamanan dan perdamaian dunia juga dapat diperbaiki. Kebijakan '*America first*' di bawah Trump yang menjadi alasan AS menarik diri dari tanggung jawabnya dalam mewujudkan perdamaian dunia dalam empat tahun terakhir telah mengorbankan multilateralisme dan mendukung kebijakan sepihak (unilateral) yang tidak adil dan mengobarkan bara konflik baru di Timur-Tengah dan kawasan lain seperti Amerika Latin, Eropa, terutama bekas negara Uni Soviet dan Balkan, dan kawasan Asia Tenggara dengan konflik Laut China Selatan-nya.

Di bawah komando Trump, kinerja AS sebagai salah satu negara adidaya dunia telah melecehkan peran PBB dan organisasi-organisasi di bawahnya, seperti WHO, UNHCR dan UNICEF, sehingga AS semakin meninggalkan tanggung jawab globalnya sebagai negara penjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Secara menyedihkan, di bawah Trump, AS membiarkan *humanitarian crisis* (krisis kemanusiaan), seperti masalah pengungsi dan migrasi penduduk yang masih terjadi di berbagai kawasan. Adalah sangat ironis, negara yang selama ini berkampanye hebat tentang HAM, bisa menutup mata terhadap

krisis pengungsi dan persoalan kaum migran, yang di dalamnya terdapat perempuan dan anak-anak. Kehadiran Biden sebagai pengganti Trump, diharapkan akan memunculkan kembali semangat humanisme global AS.

Respons Dunia

Para pemimpin dunia, terutama dari negara-negara sekutu tradisional AS di Eropa, menyambut hangat terpilihnya Joe Biden sebagai Presiden AS ke-46. Mereka berharap kerja sama internasional dalam berbagai bidang akan pulih setelah era yang penuh gejolak dalam politik luar negeri AS di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump. Para pemimpin dunia melihat terpilihnya Biden memberi kesempatan untuk memperkuat kerja sama dalam berbagai persoalan krusial, mulai dari penanganan pandemi Covid-19, perubahan iklim, hingga pemulihan kembali pendekatan multilateralisme dalam diplomasi internasional.

Kanselir Jerman Angela Merkel menilai, Biden yang terpilih sebagai Presiden AS telah berpengalaman puluhan tahun dalam kebijakan dalam dan luar negeri dan memahami Jerman serta Eropa dengan baik. Menurut Merkel, AS dan mitra-mitra Eropanya harus bersatu untuk menghadapi tantangan sekarang ini (voaindonesia.com., 10 November 2020). Perdana Menteri Inggris Boris Johnson menyatakan siap untuk melanjutkan kerja sama dengan AS di bawah kepemimpinan Biden terkait demokrasi, hak asasi manusia,

dan memerangi perubahan iklim (cnnindonesia.com., 9 November 2020). Sebelumnya, Presiden Komisi Uni Eropa, Ursula von der Leyen, juga telah mengucapkan selamat atas terpilihnya Joe Biden sebagai presiden, dan siap mengintensifkan kerja sama dengan AS (idntimes.com., 8 November 2020).

Presiden Joko Widodo, melalui akun media sosialnya, juga mengucapkan selamat kepada Joe Biden dan Kamala Harris yang memenangkan pilpres AS, dan berharap kerja sama antara Indonesia dan AS semakin erat dan dapat membawa manfaat besar bagi rakyat kedua negara (kompas.com., 8 November 2020). Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, yang selama pemerintahan Trump bersikap kritis terhadap AS, juga mengucapkan selamat kepada Biden dan berharap terjalin hubungan erat antara Turki dan AS (republika.co.id., 11 November 2020). Dirjen WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, juga berharap pihaknya dapat bekerja sama erat dengan pemerintahan presiden terpilih AS, Joe Biden, menyusul kemenangannya dalam pilpres 2020.

Penutup

Dengan terpilihnya Joe Biden sebagai Presiden baru AS, di tingkat global, AS diharapkan tidak menunjukkan “permainan akrobat baru” dalam menjalankan berbagai kebijakan luar negerinya. Hal ini termasuk menarik diri secara tiba-tiba tanpa alasan yang jelas dan kuat

dari kesepakatan internasional, termasuk perjanjian nuklir Iran, yang sebelumnya tidak menjadi karakter dan tradisi Pemerintah AS yang menjunjung tinggi hukum internasional dan kesepakatan yang telah dicapai bersama. Harapan baru ini juga muncul di kawasan untuk membangun solusi multilateral yang kuat atas masalah Laut China Selatan dengan peran AS yang lebih aktif dalam mendukung kebijakan Indo-Pasifik yang digagas Indonesia melalui Menu RI sebelumnya, Marty Natalegawa, dan keterlibatan AS dalam implementasi ASEAN *Outlook on Indo-Pacific* (AOIP).

AS dengan kepemimpinan Demokrat di bawah Biden juga diharapkan dapat mendukung kebijakan luar negeri Indonesia atas Palestina dan Resolusi PBB No. 242 yang menawarkan solusi dua negara atas penyelesaian konflik Palestina-Israel yang hidup berdampingan secara damai dan berdaulat dengan batas teritorial sebelum Perang 1967. Di luar itu, tentu saja masih bisa lebih banyak yang diharapkan, termasuk dalam mengurangi agresivitas neo-liberal AS di sektor ekonomi dan perdagangan dari seorang presiden terpilih asal Demokrat, Joe Biden, yang telah berperan dalam kepemimpinan Presiden Barack Obama selama dua periode sebelum Trump.

Referensi

- “Biden dan Empat Tantangannya”, *Kompas*, 9 November 2020, hal. 4.
- “Dunia Memasuki Fajar Baru”, *Kompas*, 9 November 2020, hal. 1 & 15.

“Erdogan Ucapkan Selamat kepada Joe Biden”, *republika.co.id.*, 11 November 2020, <https://republika.co.id/erdogan-ucapkan-selamat-kepada-joe-biden>, diakses 11 November 2020.

“Kanselir Jerman Ucapkan Selamat Atas Kemenangan Biden-Harris”, *voaindonesia.com.*, 10 November 2020, <https://www.voaindonesia.com/a/kanselir-jerman-ucapkan-selamat-atas-kemenangan-biden-harris/>, diakses 10 November 2020.

“Joe Biden elected president”, *cnn.com.*, 9 November 2020, <https://edition.cnn.com/politics/trump-biden-election-results/11-08-20/> diakses 9 November 2020.

“WHO Harap Bisa Kerja Sama dengan Biden Atasi Covid-19”, *cnnindonesia.com.*, 10 November 2020, <https://www.cnnindonesia.com/who-harap-bisa-kerja-sama-dengan-biden-atasi-covid-19>, diakses 10 November 2020.

“PM Inggris Berupaya Jalin Hubungan dengan Biden”, *cnnindonesia.com.*, 9 November 2020, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/pm-inggris-berupaya-jalin-hubungan-dengan-biden/>, diakses 10 November 2020.

“Presiden Jokowi Ucapkan Selamat kepada Joe Biden dan Kamala Harris”, *kompas.com.*, 8 November 2020, <https://nasional.kompas.com/presiden-jokowi-ucapkan-selamat-kepada-joe-biden-dan-kamala-harris>, diakses 10

November 2020.
"Presidential Elections Results and Electoral Map 2020", *cnn.com.*, 8 November 2020, <https://edition.cnn.com/election/2020/>, diakses 9 November 2020.
"Saatnya Membuka Mata AS,"

Kompas, 6 November 2020, hal. 4.
Satria, Lintar, "AS Resmi Keluar dari Kesepakatan Paris," *Republika*, 6 November 2020, hal. 4.



Poltak Partogi Nainggolan
partogi.nainggolan@dpr.go.id



Simela Victor Muhamad
simela.muhamad@dpr.go.id

Prof. Dr. phil. Poltak Partogi Nainggolan, M.A., menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Politik dan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu-ilmu Sosial, Universitas Indonesia pada tahun 1986, pendidikan S2 Ilmu Politik dan Hubungan Internasional the University of Birmingham (UK) pada tahun 1999, dan pendidikan S3 Ilmu Politik dan Hubungan Internasional Albert Ludwigs Universitaet Freiburg (Deutschland) pada 2011 dengan *judicium magna cumlaude*. Beliau adalah seorang Profesor Riset bidang Hubungan Internasional pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: *Indonesia dan Rivalitas China, Jepang, dan India* (2018) dan *Proxy War* di Timur Tengah (2019).

Drs. Simela Victor Muhamad, M.Si. adalah Peneliti Ahli Utama Bidang Isu-isu Politik Strategis, Masalah Internasional dan Domestik pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian (Puslit BKD) DPR RI. Aktif sebagai peneliti pada Puslit BKD DPR RI, yang bertugas memberikan dukungan substansi terkait isu-isu hubungan internasional kepada Anggota DPR RI. Beberapa Karya tulis ilmiah yang pernah diterbitkan antara lain: "Kejahatan Transnasional Penyelundupan Narkoba ke Indonesia: Masalah dan Upaya Penanganannya" (bagian dari buku *Aktor Non-Negara: Kajian Implikasi Kejahatan Transnasional di Asia Tenggara*, Penerbit Yayasan Obor, Indonesia, 2017); "Isu Keamanan Semenanjung Korea dan Upaya Damai Parlemen." (artikel di *Jurnal Politica* Vol 7 No. 1, Mei 2016); "Peran *Asian Parliamentary Assembly* dalam Mendukung Solusi Damai Palestina-Israel" (artikel di *Jurnal Politica*, Vol. 8 No. 1, Mei 2017); "Indonesia dan Kerja Sama Internasional Penanggulangan Terorisme di Kawasan" (bagian dari buku *Kerja Sama Internasional Melawan Terorisme*, Penerbit Yayasan Obor, Indonesia, 2018); dan "*Proxy War* dalam Konflik di Lebanon" (bagian dari buku *Proxy War* di Timur Tengah, Penerbit Yayasan Obor, Indonesia, 2019).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.